

**LAPORAN PENELITIAN  
DOSEN MUDA**

**DINAMIKA POLITIK PEMBAHASAN DRAFT  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEISTIMEWAAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (RUUK DIY)  
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DPRD DIY)**

**Disusun oleh:  
Dian Eka Rahmawati, S.IP, M.Si**

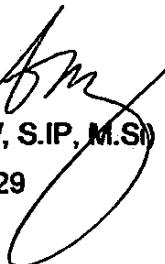
**Penelitian ini dibiayai oleh:  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional  
Sesuai dengan  
Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian  
Nomor .....  
Tanggal .....**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
OKTOBER 2007**

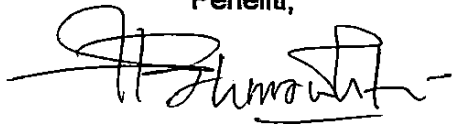
## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian:  
DINAMIKA POLITIK PEMBAHASAN DRAFT RUU KEISTIMEWAAN DIY  
DI DPRD DIY
2. Bidang Ilmu : Ilmu Sosial
3. Identitas Peneliti
  - a. Nama : Dian Eka Rahmawati, S.IP, M.Si
  - b. Golongan, Pangkat, NIP : III A / Penata Muda / 163.067
  - c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
  - d. Fakultas / Jurusan : Fisipol / Ilmu Pemerintahan
4. Lokasi Penelitian : Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Lama Penelitian : 7 bulan
6. Biaya Penelitian : Rp. 9.900.000

Yogyakarta, Oktober 2007

Mengetahui,  
Dekan, FISIPOL UMY  
  
(Bambang Eka C.W, S.IP, M.Si)  
NIP. 163.029



Peneliti,  
  
(Dian Eka Rahmawati, S.IP, M.Si)  
NIP. 163.067

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian  
LP3 UMY

  
(Said Tuhuleley)  
NIP. 130.21



## ABSTRAK

Gerakan reformasi tahun 1998 membawa implikasi pada politik lokal yang cukup dinamis di Yogyakarta, terlebih ketika Yogyakarta menjadi parameter gerakan pro demokrasi ini. Salah satu isu politik yang menjadi polemik panjang hingga saat ini adalah pemaknaan kembali keistimewaan DIY dalam bingkai demokratisasi politik lokal, khususnya pada aspek mekanisme rekrutmen gubernur dan wakil gubernur. Perdebatan mengenai rekrutmen gubernur dan wakil gubernur kemudian seolah-olah mengesampingkan interpretasi mengenai substansi keistimewaan DIY yang lain, karena keistimewaan DIY sesungguhnya juga terletak pada pengaturan tanah kasultanan dan tanah pakualaman, serta warisan budayanya. Untuk itulah diperlukan pemikiran dan sikap yang arif supaya upaya reinterpretasi keistimewaan DIY tidak menjadi bursa kepentingan politik. Disinilah DPRD DIY sebagai lembaga politik yang memiliki fungsi merepresentasi aspirasi masyarakat Yogyakarta berperan penting. Dinamika sosial politik yang terjadi dalam masyarakat sudah barang tentu juga mempengaruhi dinamika politik pembahasan draft RUU Keistimewaan DIY di DPRD DIY. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada dinamika politik yang terjadi dalam pembahasan draft RUU Keistimewaan DIY versi DPRD DIY.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan menganalisa dinamika politik yang terjadi dalam pembahasan RUU Keistimewaan DIY di DPRD DIY. Unit analisa dalam penelitian ini adalah DPRD DIY sebagai sebuah institusi atau lembaga politik. Jenis data yang diperlukan adalah jenis data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara dan data sekunder yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa kualitatif dengan tahap-tahap: pemrosesan satuan data, reduksi data, pengkategorisasian data termasuk pemeriksaan keabsahan data, dan penafsiran data.

Setelah dilakukan pengumpulan data dan analisa data, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Ada beberapa undang-undang yang mengatur eksistensi daerah istimewa, termasuk DIY, yaitu UU no. 22 tahun 1948, UU no.1 tahun 1957, UU no.18 tahun 1965, UU no.5 tahun 1974, UU no.22 tahun 1999, dan UU no.32 tahun 2004. Sedangkan yang secara khusus mengatur tentang Pembentukan DIY adalah UU no.3 tahun 1950, namun UU itu dirasa sangat singkat karena hanya terdiri dari tujuh pasal, sehingga tidak mampu mengatur kompleksitas permasalahan keistimewaan Yogyakarta.
2. Terkait dengan dinamika politik pembahasan RUU Keistimewaan DIY versi DPRD DIY:
  - a. Sumber hukum yang digunakan oleh tiap-tiap fraksi untuk menafsirkan aspek keistimewaan Yogyakarta cukup bervariasi, yaitu: Maklumat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII tanggal 5 September 1945 dan 30 September 1945, UU no.3 tahun 1950 dan

penjelasannya, UU no.19 tahun 1950 dan penjelasannya, UU no. 3 tahun 1950 dan penjelasannya, UU no.22 tahun 1999 dan penjelasannya, Amandemen II UUD 1945 dan penjelasannya. Hal ini berimplikasi pada interpretasi yang berbeda-beda antar fraksi terhadap aspek keistimewaan Yogyakarta. Perbedaan penafsiran antar fraksi bisa dikategorikan ke dalam tiga aspek, yaitu: aspek pengisian jabatan gubernur / kepala daerah dan wakil gubernur / wakil kepala daerah, aspek pertanahan, dan aspek budaya – adat istiadat – sejarah yang melekat pada Kraton Yogyakarta dan Pakualaman.

- b. Pandangan fraksi-fraksi mengenai pengisian jabatan gubernur / kepala daerah dan wakil gubernur / wakil kepala daerah DIY dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: **Pertama**, pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY untuk periode 2003-2008. Perbedaan sumber hukum yang digunakan oleh tiap-tiap fraksi untuk menafsirkan aspek keistimewaan Yogyakarta berdampak pada adanya beragam interpretasi terhadap mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Dari proses politik dan dinamika politik yang terjadi di DPRD DIY, akhirnya dewan memutuskan penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY untuk periode 2003-2008. **Kedua**, pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur dalam draft RUU Keistimewaan DIY versi DPRD DIY tidak satu suara, sehingga dalam draft tersebut pandangan tiap fraksi disampaikan dalam bentuk alternatif-alternatif pandangan.

Dari hasil analisa data tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam pembahasan draft RUU Keistimewaan DIY versi DPRD DIY terjadi proses politik dan dinamika politik yang dinamis, tarik ulur yang paling kuat terjadi dalam pembahasan mekanisme pengisian jabatan gubernur / kepala daerah dan wakil gubernur / kepala daerah. Pada kasus penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY periode 2003-2008 sesungguhnya tidak semua fraksi menyetujui keputusan tersebut, tapi karena dibutuhkan kearifan dari dewan untuk mengambil keputusan yang menyuarakan dan menerima aspirasi masyarakat Yogyakarta yang berkembang saat itu sebagai fakta publik, maka akhirnya dewan memutuskan penetapan. Sedangkan tidak adanya satu suara dalam draft RUU Keistimewaan DIY versi DPRD DIY bisa dipahami dari latar belakang dan kepentingan politik fraksi yang berbeda-beda.

## **PRAKATA**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT dan salam serta sholawat bagi Rasulullah Muhammad SAW. Pada akhirnya penelitian dengan judul **DINAMIKA POLITIK PEMBAHASAN DRAFT RUU KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA DI DPRD DIY** ini bisa kami selesaikan sesuai target waktu yang ditentukan.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, masukan dan saran demi perbaikan laporan hasil penelitian ini akan kami terima dengan tangan terbuka. Kami juga berharap penelitian ini bisa memberikan manfaat dan bisa menjadi batu pijakan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam tentang kajian yang sama. Terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Yogyakarta, 4 Oktober 2007**

**Peneliti,**

**Dian Eka Rahmawati**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK.....	iii
PRAKATA .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
<b>III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....</b>	<b>13</b>
<b>IV. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	14
B. Cakupan / Fokus Penelitian.....	15
C. Unit Analisa .....	15
D. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	15
E. Teknik Analisa Data .....	17
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Tinjauan Historis Yuridis Berdirinya Propinsi DIY .....	18
B. Kedudukan dan Keistimewaan DIY Berdasarkan Peraturan Perundangan yang Pernah Berlaku .....	21
C. Dinamika Politik Pembahasan Draft RUU Keistimewaan DIY di DPRD DIY .....	37
1. Pandangan Fraksi – fraksi Mengenai Aspek Keistimewaan DIY .....	40
2. Pandangan Fraksi – fraksi Mengenai Pengisian Jabatan Gubernur / Kepala Daerah dan Wakil Gubernur / Wakil Kepala Daerah DIY .....	53

<b>VI. KESIMPULAN .....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN :</b>	
<b>1. Curriculum Vitae Peneliti .....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>TABEL 1</b> Pandangan Tiap Fraksi Terhadap Sumber Hukum dan Aspek Keistimewaan DIY .....	51
<b>TABEL 2</b> Pandangan Tiap Fraksi Terhadap Keistimewaan Pertanahan .....	52
<b>TABEL 3</b> Pandangan Tiap Fraksi Terhadap Pengisian Jabatan Gubernur / Kepala Daerah dan Wakil Gubernur / Wakil Kepala Daerah untuk Periode Jabatan 2003 – 2008 .....	68
<b>TABEL 4</b> Pandangan Tiap Fraksi Terhadap Pengisian Jabatan Gubernur / Kepala Daerah dan Wakil Gubernur / Wakil Kepala Daerah dalam Draft RUU Keistimewaan DIY Versi DPRD DIY .....	69